

TRADISI DAN MODERNISASI DI INDONESIA

Oleh Ajip Rosidi (Osaka Gaikokugo Daigaku)

I

Biasanya orang mempertentangkan istilah “tradisi” dengan “modernisasi”. Tradisi, menurut mereka, adalah penghambat modernisasi. Modernisasi hanya dapat dijumpai apabila masyarakat tradisional sudah dirobohkan. Tetapi saya ingin memakai batasan istilah “tradisi” yang mempunyai ruang-lingkup yang lebih luas, dan dengan demikian memberikan pengertian yang lebih tepat, yaitu batasan yang diberikan oleh Edward Shils dalam bukunya *Tradition* (The University of Chicago Press, 1981). Menurut Shils: “In its barest, most elementary sense, it means simply a *traditum*; it is anything which is transmitted or handed down from the past to the present..... includes material objects, beliefs about all sort of things, images of persons and events, practices and institutions. It includes buildings, monuments, landscapes, sculptures, paintings, books, tools, machines. It includes all that a society of a given time possesses and which already existed when its present possessors came upon it and which is not solely the product of physical processes in the external world or exclusively the result of ecological and physiological necessity (p.12).

Harus melingkupi waktu berapa lama pewarisan itu, Shils sendiri mengatakan bahwa tak ada keterangan yang memuaskan mengenai hal ini (h.15). Namun kalau waktunya terlalu singkat, niscaya pewarisan itu tidaklah sampai menjadi tradisi. Menurut Shils, untuk itu, maka harus paling tidak melalui pewarisan tiga generasi (p.15). Tapi Shils sendiri tidak mengatakan dengan pasti berapa lamanya satu generasi itu.

Sedangkan untuk pengertian istilah “modernisasi” saya ingin mengambil batasan J.W. Schoorl dalam bukunya *Sociologie der modernisering: een inleiding in de sociologie der niet-westerse volken* (van Loghum Slaterus, 1974).

Menurut Schoorl: “Modernisasi sesuatu masyarakat ialah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya... (p.1). Batasan ini ingin saya hubungkan dengan batasan Koentjaraningrat dalam bukunya yang terkenal *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan* (Gramedia, 1974) yang mengatakan “Apabila suatu bangsa dengan sadar memulai proses modernisasinya, maka sebenarnya ia hanya mau berusaha menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada zaman bangsa itu hidup. Dalam arti itu, maka segala zaman, dan tidak hanya abad ke-20 ini, pernah mengalami suatu usaha dan proses modernisasi” (cetakan kesembilan, 1982: p.138).

Kalau kita simak ketiga batasan yang diberikan oleh ketiga orang sarjana itu, maka kita tidak usah melihat istilah “tradisi” sebagai lawan arti dari “modernisasi”, melainkan memahami keterjalinan kedua istilah itu satu sama lain. Suatu masyarakat yang sudah mempunyai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, ketika hendak menerima warisan-warisan yang lain daripada yang sudah dimilikinya, sehingga menimbulkan suatu perubahan yang menyeluruh dalam aspek-aspek kehidupannya, mengalami proses modernisasi; kemudian kalau proses itu sudah selesai dan transformasi itu sudah sempurna, masyarakat itu akan melanjutkan tradisinya yang baru.... sampai ia kemudian berhadapan pula dengan situasi baru yang mengharuskannya melakukan transformasi lagi.

Koentjaraningrat dalam bukunya yang sudah disebut itu memberikan contoh bahwa pada antara abad ke-2 S.M. dengan abad ke-2 M. ketika negara Rumawi menentukan konstelasi dunia, maka banyak kerajaan di sekitar Laut Tengah, di Eropah Tengah dan Utara, dengan sadar berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan dunia yang ditentukan oleh kehidupan ekonomi, politik dan kebudayaan Negara Rumawi itu. Antara abad ke-4 dengan abad ke-10 ketika kerajaan-kerajaan besar di India dan Cina menentukan konstelasi dunia, banyak kerajaan di Asia Tenggara dan Asia Timur dengan sadar berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi, politik dan kebudayaan kerajaan-kerajaan besar di India atau Cina tersebut (op. cit. p.138).

Kalau begitu maka sebenarnya masyarakat kepulauan Nusantara sepanjang sejarahnya selalu dalam proses modernisasi, karena senantiasa mengalami proses transformasi dengan datangnya berbagai pengaruh yang timbul karena terjadi gelombang-gelombang kekuasaan dunia yang silih berganti. Setelah mun-

dur kerajaan-kerajaan India, maka masarakat Indonesia menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi, politik dan kebudayaan kerajaan-kerajaan Islam, sebelum pada akhirnya diterjang gelombang yang datang dari Eropah. Berlainan dengan pengaruh Islam yang masuk dengan damai, maka orang-orang Eropah datang ke kepulauan Nusantara dikuasai oleh nafsu kapitalisme yang mulai tumbuh, menaklukkan satu demi satu kerajaan-kerajaan yang tadinya berdiri sendiri, baik secara langsung maupun dengan cara mengadu-dombakan sesamanya. Dengan kian berkuasanya negara-negara Eropah dalam percaturan dunia, maka terjadi pula proses transformasi masarakat Nusantara yang menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi, politik dan kebudayaan Eropah.

Perlu lebih dahulu saya kemukakan, bahwa kepulauan Nusantara yang terletak antara benua Asia dengan benua Australia itu, dibagi-bagi oleh beberapa negara Eropah: Inggeris, Belanda, Sepanyol dan Portugis. Sebenarnya Portugis dan Sepanyol yang datang lebih dahulu, tetapi ternyata kemudian Belanda yang menguasai sebagian besar daripadanya. Pembagian yang dilakukan oleh penguasa-penguasa bangsa Eropah itu, kemudian menentukan pembentukan negara-negara merdeka yang setelah perang dunia kedua muncul di kawasan tersebut. Daerah yang dahulu dikuasai oleh bangsa Belanda dikenal dengan sebutan *Nederlandsch-Indie* (Hindia Belanda), menjadi Republik Indonesia. Portugis yang akhirnya hanya menguasai ujung timur pulau Timor, akhirnya harus meninggalkannya, setelah penduduk setempat menyatakan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Kawasan yang tadinya dikuasai oleh Inggeris, sekarang menjelma menjadi negara-negara Malaysia, Singapura dan Brunei. Sedangkan wilayah yang semula dikuasai oleh Sepanyol, setelah terlebih dahulu berpindah-tangan kepada Amerika Serikat, kemudian menjadi negara Republik Filipina. Ujung timur Pulau Irian, menjadi negara Papua Nyugini.

Di dalam kawasan ini hidup beratus-ratus macam sukubangsa yang masing-masing mempunyai sejarah, adat-istiadat, bahasa, kesenian, agama dan kepercayaan yang berlain-lainan. Waktu bangsa-bangsa Eropah memancarkan kekuasaannya masing-masing, mereka samasekali tidak memperhatikan kehidupan kebudayaan masarakat yang terdapat di daerah yang hendak dikuasainya sehingga misalnya sukubangsa Melayu yang hidup di sebelah-menyebelah Selat Malaka terpecah dua, yang tinggal di pantai Timur Sumatera dan di pulau-

pulau Riau masuk ke dalam kekuasaan Belanda, sedangkan yang tinggal di Semenanjung Melaka dan pulau Singapura masuk ke dalam kekuasaan Inggris. Hal itu menentukan nasib mereka sampai sekarang: sebagian menjadi warganegara Republik Indonesia, sebagian menjadi warganegara Singapura dan sebagian lagi menjadi warganegara Malaysia. Adat-istiadat, cara berpakaian, jenis kesenian, kesusasteraan dan lainnya yang sejak berabad-abad menjadi milik mereka bersama, tetap banyak yang masih hidup sampai sekarang, walaupun mereka telah dipisahkan oleh status kewarganegaraannya. Bahkan bahasa Melayu yang di Indonesia kemudian menjadi Bahasa Indonesia di negara-negara tersebut menjadi bahasa nasional masing-masing—walaupun karena pengaruh perkembangan sejarah di bawah bangsa penjajah yang berbeda-beda, memberikan warna yang khas bagi setiap wilayah. Namun tetap mereka dengan mempergunakan bahasanya masing-masing akan dapat saling mengerti dengan baik.

Indonesia yang paling luas daerahnya, terdiri atas belasan ribu pulau besar dan kecil, mempunyai jumlah sukubangsa dan bahasa yang paling banyak. Namun bukan jumlahnya saja besar, melainkan perbedaan-perbedaan yang terdapat di antaranya pun besar sekali. Sukubangsa tertentu, terutama yang hidup di pulau Jawa, telah memperlihatkan tingkat peradaban yang tinggi dan maju, sebagian telah akrab dan mempergunakan hasil-hasil penemuan teknologi yang paling akhir, namun masih ada sukubangsa yang sesungguhnya (belum lama) masih hidup dalam zaman batu seperti sukubangsa-sukubangsa tertentu di Irian Jaya. Sukubangsa-sukubangsa lainnya yang terdapat di Indonesia, berada di antara kedua macam tingkat peradaban itu, sehingga secara keseluruhan bangsa Indonesia hidup dalam tingkat-tingkat peradaban manusia yang mencerminkan perkembangan peradaban manusia sepanjang sejarah. Kalau kita berjalan dari satu pulau ke pulau yang lain, maka yang kita tempuh bukan saja jarak dari satu tempat ke lain tempat, melainkan juga jarak waktu dari satu jaman ke lain jaman: di samping ada sukubangsa yang masih hidup dalam zaman batu yang terutama hidup dari hasil berburu, ada juga yang sudah mengenal peradaban cocok-tanam dengan cara menebang hutan untuk berladang dan kemudian meninggalkannya kalau humus tanah sudah menjadi kurus, mencari lagi hutan yang masih penuh humus untuk ditebang lagi dan seterusnya; dan ada pula yang sudah hidup di jaman modern; masih banyak sukubang-

sa yang hidup secara tertutup, walaupun usaha pemerintah selama ini untuk mengajak mereka agar hidup sama tingkat dengan saudara-saudaranya sebangsa yang lain telah kian mengurangi jumlah sukubangsa seperti itu. Bagaimana pun terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup besar antara berbagai suku-bangsa yang terdapat di Indonesia.

Saya menganggap perlu mengemukakan kenyataan itu di sini, walaupun sepintas saja, untuk memperlihatkan perbedaan hakiki yang dihadapi oleh bangsa Jepang ketika pertengahan abad yang lalu di bawah Kaisar Meiji hendak mulai melakukan modernisasi dengan bangsa Indonesia yang baru pada pertengahan abad ke-20 ini memperoleh kemerdekaannya setelah mengalami penjajahan berbagai-bagai bangsa lain yang juga berlain-lainan lama dan intensitasnya dari satu daerah ke daerah yang lain (walaupun secara mudah, banyak orang yang berkata bahwa Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun, yang kalau diteliti akan ternyata tidak demikian halnya).

Pada waktu Kaisar Meiji menetapkan untuk memulai proses modernisasi, bangsa Jepang sudah kl. 300 tahun merupakan suatu bangsa yang padu, yang mendukung suatu kebudayaan, sebuah bahasa yang sama. Di atas semuanya ada Kaisar yang telah beribu-ribu tahun menjadi lambang penguasa dan kesatuan Jepang, sehingga Jepang merupakan suatu kesatuan politik yang ketat. Dengan kata lain, pada waktu itu kesatuan Jepang baik secara politik maupun secara kebudayaan, sudah merupakan tradisi yang panjang.

Hal itu berlainan sekali dengan keadaan Indonesia. Pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, yang sudah dimiliki hanyalah bahasa nasional yang sudah disepakati pada tahun 1928 tapi yang pada waktu itu belum secara intensif dikuasai dan dihayati oleh sebagian besar rakyat; bendera merah-putih, lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan tekad yang bulat untuk mendirikan satu negara-bangsa (nation state) yang berdaulat. Undang-undang Dasar dan pemerintah baru dibentuk keesokan harinya dan ternyata masalah yang segera mereka hadapi pun bukanlah usaha modernisasi, melainkan menghadapi Belanda yang hendak kembali menjajahnya—yang menghabiskan waktu lima tahun sebelum pada akhirnya bangsa Indonesia mendapat kedaulatannya. Dan pada tahun-tahun pertama setelah pengakuan kedaulatan itu pun, bangsa Indonesia masih harus membenahi dirinya ke dalam, karena timbulnya berbagai pergolakan politik, yang menyebabkan lemahnya pemerintah sebagai

salah satu faktor pemersatu bangsa. Terdapatnya perbedaan-perbedaan pandangan di antara partai-partai yang ada pada waktu itu, yang tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan pandangan politik saja, melainkan juga disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan yang lebih fundamental lantaran latar belakang budaya dan pendidikan para pemimpin partai itu sendiri yang berlain-lainan, telah menyebabkan melemahnya partai-partai sebagai kekuatan sosial karena kehilangan kepercayaan dari tentara yang sebagai organisasi lebih tersusun rapi dan lebih modern. Setelah terjadi pergolakan-pergolakan di daerah (yang juga sebenarnya merupakan pergolakan di antara para perwira tentara sendiri), kedudukan tentara di Indonesia makin menonjol. Tatkala pada tahun 1959, sidang Konstituante macet karena tidak berhasil mengambil keputusan mengenai dasar negara dan bentuk negara, dengan dukungan tentara Sukarno membubarkan lembaga penyusun undang-undang dasar yang dipilih melalui pemilihan umum yang pertama itu dan sejak itu satu demi satu ia mengambil kekuasaan pemerintahan ke tangannya sendiri. Niscaya merupakan suatu studi tersendiri yang menarik, mengapa seorang pejuang kemerdekaan seperti Sukarno yang mula-mula percaya kepada demokrasi kemudian melakukan tindakan yang jelas-jelas melemahkan sendi-sendi kehidupan demokrasi. Namun pasti hal itu bertalian dengan latar belakang kebudayaan dan pendidikan Sukarno pribadi: seorang Jawa, Islam, mendapat pendidikan Belanda (ia selalu bersekolah di sekolah Belanda), terpengaruh oleh gagasan-gagasan sosialisme melalui bacaan, dan kemudian terjun ke dalam pergerakan kebangsaan sebagai pemimpin yang menonjol dari kawan-kawannya separtai. Berlainan dengan Hatta dan Syahrir, Sukarno tidak pernah ke luar negeri dan memimpin organisasi di luar negeri. Kenyataan itu, seperti pernah diperlihatkan oleh seorang sarjana sejarah, menyebabkan Sukarno selama memimpin pergerakan kebangsaan melalui partainya (PNI) di sekitar tahun 1930, tidak menemukan kawan yang seimbang. Maka sebagai seorang Jawa ia selalu hidup dalam pola tradisi Jawa di mana pemimpin merupakan suatu sumber kebenaran yang memberikan keputusan tentang segala macam soal yang timbul, sedangkan pendapat-pendapat yang disampaikan kepadanya hanyalah menjadi bahan pertimbangan saja yang dapat saja diabaikannya. Dan sikap Sukarno demikian ternyata bersesuaian pula dengan tradisi tersebut yang masih tumbuh subur dalam alam pikiran rakyat Jawa khususnya, rakyat Indonesia umumnya, yang

mempercayakan segala sesuatu kepada pemimpinnya, karena percaya bahwa pemimpinnya lebih arif dan tidak akan mengurbankannya. Menurut alam pikiran Jawa, rakyat itu adalah abdi dari raja, maka hidup-matinya semata-mata terserah kepada sang raja. Namun demikian ada satu tradisi yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan kehendaknya, yaitu dengan mengenakan baju putih lalu duduk di alun-alun menunggu dipanggil oleh sang raja. Biasanya hal itu dilakukan kalau terjadi sesuatu yang luar biasa dalam tata-laksana pemerintahan.

Tetapi Indonesia pada awal tahun 1960-an, tidak lagi sepenuhnya Jawa dan memang Indonesia bukan Jawa (saja), terlebih-lebih karena lembaga untuk memberi kesempatan kepada rakyat yang mempunyai kehendak agar menyampaikan kehendaknya itu dengan berbaju putih pun tidak lagi terdapat, maka masa-masa itu merupakan saat kemunduran kehidupan demokrasi di Indonesia. Adanya usaha hendak melestarikan kekuasaan yang dianggapnya masih goyah, menyebabkan setiap suara yang tidak sesuai dengan koor-bersama yang dipimpin oleh Sukarno, dianggap sebagai subversi, kontra revolusi, dll. Maka barangsiapa yang dianggap demikian, segera dijabloskan ke dalam penjara tanpa proses selama bertahun-tahun, kadang-kadang disertai dengan penyiksaan-penyiksaan yang sadistik.

Sejak saat itu maka tumbuhlah suatu alam pikiran pada bangsa Indonesia, bahwa orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah, adalah musuh pemerintah, walaupun istilah yang dipakai sekarang misalnya tidak lagi sama dengan istilah-istilah yang dipakai pada masa Sukarno. Alam pikiran ini menyebabkan berkembangnya perasaan pada para pejabat pemerintah bahwa mereka selalu benar, dan berkembangnya kesadaran pada rakyat banyak, bahwa kalau mau selamat haruslah pandai-pandai menjaga lidah. Tak usah diterangkan bahwa kesadaran demikian menyebabkan tertahannya arus aspirasi rakyat, apalagi karena sarana untuk itu pun sangat dibatasi, hal mana nampak dari kontrol yang ketat terhadap pers dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

II

Ketika pemerintah Orde Baru pada akhir dasawarsa 1960-an mulai melaksanakan modernisasi, maka ia berhadapan dengan masyarakat yang terdiri atas

sukubangsa-sukubangsa yang berlainan tingkat pendidikan, alam pikiran dan peradabannya; sedangkan kesadaran tentang demokrasi di kalangan elite-nya pun telah meredup di bawah “Demokrasi Terpimpin” Sukarno. Suara-suara sebagian kaum intelektual yang menghendaki kebebasan yang lebih leluasa yang muncul pada tahun-tahun pertama setelah kejatuhan Sukarno, segera pula meredup karena dianggap akan mengganggu jalannya roda pembangunan (=modernisasi). Pemerintah yang merupakan suatu elite kerjasama tentara dengan kaum intelektual, menekankan program pembangunan pada kehidupan ekonomi dan pertanian. Untuk mengatasi kelemahan bangsa Indonesia sendiri dalam bidang permodalan, maka diundanglah modal asing dengan berbagai kondisi yang cukup menggiurkan. Dalam usaha untuk memberikan jaminan terhadap modal asing, pemerintah melakukan berbagai tekanan terhadap hak-hak buruh bangsa sendiri yang bekerja pada perusahaan asing itu. Di samping itu berbagai fasilitas yang diberikan terhadap modal asing itu, sering pula menyebabkan gulungtikarnya modal-modal dalam negeri yang selama itu bergerak dalam bidang usaha tertentu misalnya tekstil, pabrik limun, dll.

Kalau kita bandingkan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dengan pemerintah Orde Lama (Sukarno), maka kita akan melihat perbedaan yang sangat ekstrim. Pada masa Sukarno, modal asing bukannya diundang, melainkan yang sudah ada pun diusir. Namun demikian hak-hak buruh pada masa Sukarno pun sama-sama tidak mendapat perhatian yang wajar. Pada masa itu pun hak buruh untuk mogok sudah dicabut. Hanya istilahnya yang berbeda! Dulu demi revolusi, sekarang demi kelancaran pembangunan.

Nampaknya Sukarno lebih menekankan atas pembangunan yang diusahakan oleh bangsa sendiri daripada atas bantuan modal asing. Dia lebih percaya kepada paham sosialis, dan secara terbuka menentang kapitalisme dan imperialisme yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan bangsa-bangsa di dunia dan yang karena itu menyebabkan dia lebih dekat dengan blok negara-negara sosialis walaupun secara formal dia sendiri menjadi salah seorang pengambi inisiatif pembentukan negara-negara Non-Blok. Dia sendiri yakin akan sosialisme Indonesia, yaitu paham sosialisme yang tumbuh dan cocok dengan keadaan Indonesia yang hendak dia perembangkan, walaupun hal itu baru merupakan retorik belaka.

Tetapi pikiran yang ditekankan berulang-ulang bahwa revolusi belum sele-

sai, menyebabkan Sukarno terlibat terus-terusan dari penggalangan kekuatan rakyat dalam menghadapi musuh dari luar: setelah berhasil merebut Irian Jaya, kemudian menghadapi (konfrontasi) terhadap Malaysia yang dianggapnya sebagai proyek neo-kolonialisme. Saya kira proyek Konfrontasi terhadap Malaysia ini merupakan kekeliruannya yang terbesar yang mempercepat kebangkrutan pemerintahannya sendiri.

Mungkin kegagalan Sukarno dalam membangun kehidupan ekonomi bangsa itulah yang menyebabkan para konseptor pembangunan Orde Baru berpaling kepada arah yang sebaliknya: Kalau Sukarno meng-*go-to-hell*-kan modal asing dan bantuan asing, terutama dari negara-negara kapitalis, maka pemerintah Orde Baru mempersilakannya dengan ramah. Kisah sukses perbaikan ekonomi Orde Baru (pengendalian atas inflasi, peningkatan GNP, dll.) bukanlah tidak mengundang kritik. Meskipun kritik-kritik anti-korupsi yang dilakukan oleh para mahasiswa dapat dikendalikan, namun kritik yang mempertanyakan kebenaran arah pembangunan masih terus terdengar, terutama berupa tulisan-tulisan para sarjana yang sering bersifat teoretis. Namun kalau kritik itu dianggap terlalu langsung adanya, maka pemerintah segera turun-tangan. Ketika Prof. Deliar Noer hendak membacakan pidato ilmiahnya ketika dia diangkat sebagai gurubesar, tiba-tiba datang larangan terhadapnya. Anehnya, ketika kemudian, setelah tinggal di Australia, profesor tersebut memuatkan bagian-bagian pidato ilmiahnya itu dalam surat kabar di Indonesia, tidak ada timbul sesuatu reaksi terhadapnya.

Suara tentang sosialisme atau sosialisme Indonesia sekarang sudah jarang terdengar, namun demikian pernyataan bahwa sekarang Indonesia menganut sistem kapitalisme pun tak pernah diucapkan oleh pemerintah. Namun demikian, seorang sarjana ilmu sosial yang juga merupakan pejuang Orde Baru yang kemudian menjadi pengeritiknya yang paling keras, Arief Budiman, menyebut sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sekarang sebagai sistem kapitalisme dependen, yaitu dengan memperhatikan ciri-ciri sistem tersebut, seperti ketergantungan akan modal asing, kelas pengusaha yang juga tergantung kepada modal asing, besarnya peranan negara dalam kegiatan ekonomi dan sebagai alat represi, terjadinya kesenjangan antara orang-orang kaya dengan yang miskin, dll. yang sekarang kelihatan di Indonesia.

Arief Budiman sendiri berpendapat bahwa yang paling cocok buat Indone-

sia adalah sistem ekonomi sosialis yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di zaman Sukarno dahulu belum merupakan suatu sistem ekonomi sosialis, melainkan suatu sistem ekonomi kapitalisme nasional, karena tidak ada ciri-ciri sosialis dalam sistem perekonomiannya. Perbedaannya yang dahulu (di zaman Sukarno) dengan sekarang, menurut Arief Budiman adalah karena ke dalam negeri Bung Karno lebih populis dan ke luar negeri lebih nasionalis. Kedua-duanya sama-sama merupakan variasi dari sistem ekonomi kapitalis.

Tetapi yang sebenarnya menentukan pelaksanaan modernisasi di Indonesia, bukanlah kritik atau hasil polemik dari para sarjana tersebut, melainkan bagaimana kaum birokrat memahami instruksi yang datang dari atas, dan bagaimana ia melaksanakan instruksi tersebut. Karena aparat kontrol juga biasanya dengan cepat menyatukan diri dalam birokrasi yang ada, sedangkan kontrol langsung oleh rakyat tidak dikembangkan, bahkan tidak diberi saluran, maka pemahaman kaum birokrat itu menjadi sangat menentukan.

Hendaklah selalu diingat bahwa para pegawai pelaksana berbagai kebijaksanaan pemerintah itu, mempunyai latar belakang pendidikan dan budaya yang berlain-lainan, sehingga sering terjadi bahwa yang pada akhirnya dilaksanakan oleh pelaksana yang di bawah (jauh di daerah), berlainan sama sekali daripada tujuan semula. Sebagai ilustrasi di sini saya hanya hendak mengemukakan sebuah contoh saja, yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 1983, ketika terjadi gerhana matahari total. Karena ada yang mengemukakan bahwa ada kemungkinan bahaya membutakan mata kalau secara telanjang melihat ke arah matahari yang berada di balik bulan (ketika gerhana total), maka ada peringatan agar orang berhati-hati pada waktu gerhana tersebut terjadi. Tetapi seperti kita lihat juga dalam televisi di sini, rakyat-rakyat di desa, bahkan juga di kota-kota, dilarang sama sekali melihat gerhana secara langsung. Mereka harus masuk rumah dan hanya boleh melihatnya melalui siaran televisi. Untuk melaksanakan perintah tersebut, para pamongdesa, hansip dan lain-lain sibuk bekerja keras menyuruh orang masuk rumah. Maka peristiwa alam yang amat langka, dan yang oleh pemerintah sendiri pernah dipasarkan sebagai paket-pariwisata itu, dibiarkan berlalu begitu saja, tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri karena kesalahan para pegawai pemerintah dalam memahami instruksi.

Kalau kita ingat bahwa peristiwa gerhana matahari itu terjadi sebagian besar di pulau Jawa, yang secara relatif rakyatnya mendapat pendidikan lebih tinggi daripada di pulau-pulau lain, maka dapat kita bayangkan kemungkinan terjadinya pemahaman yang keliru terhadap instruksi dari atasan yang dilakukan oleh para pejabat di daerah-daerah yang lebih terpencil. Sayang belum ada suatu penelitian tentang hal itu dilakukan orang sehingga kita tidak mendapat gambaran yang lebih jelas, apa gerakan yang terjadi. Peristiwa gerhana matahari itu kemudian mendapat tempat yang agak luas juga dalam pers, dengan kritik yang cukup tajam melalui surat-surat pembaca, tanpa menimbulkan reaksi apa pun juga-----artinya juga tanpa keterangan dari pemerintah sendiri di mana sebenarnya gerakan kekeliruan menafsirkan instruksi itu berpangkal.

Pemerintah sendiri pada galibnya tidak pernah mengakui kekeliruan yang dilakukan oleh aparat birokrasinya. Kalau perbuatannya yang buruk itu tak dapat disembunyikan lagi, maka akan dikeluarkan pengumuman bahwa "seorang oknum" telah melakukan kelalaian. Dengan demikian seakan-akan hanya diakui bahwa yang keliru itu adalah "oknum" itu saja----padahal kesalahan demikian dilakukan pula oleh sejumlah "oknum" yang lain, yang jumlahnya cukup mengesankan, tetapi tidak semuanya mendapat perhatian, atau kalaupun diperhatikan, tidak semuanya mendapat hukuman.

Dalam hal ini saya kira ada pengaruh dari konsep tentang raja dan orang-orang kepercayaannya yang dianggap tak mungkin melakukan kekeliruan. Menurut konsep itu, jabatan yang diperoleh seseorang dalam pemerintahan, bukanlah merupakan suatu kewajiban terhadap rakyat, melainkan sebagai kedudukan yang akan memberikan berbagai fasilitas dan keuntungan bagi yang mendudukinya. (Sehubungan dengan ini baik juga diperhatikan, bahwa dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "pemerintah" yang berasal dari kata "perintah" untuk pengertian yang dalam bahasa Inggris disebut "government".) Sukses-tidaknya seorang pejabat tidak ditentukan oleh seberapa jauh dia dapat melayani publik berdasarkan tugasnya itu, melainkan seberapa jauh dia dapat melayani dalam arti menyenangkan hati atasannya.

Di Indonesia sendiri ada pemeo "ABS" (= Asal Bapak Senang), yang menyindir laporan-laporan bawahan yang hanya menyenangkan hati atasannya saja, walaupun untuk itu dia harus menekan bawahan dan membuat laporan yang tidak benar. Bertalian dengan ini, barangkali contoh yang terjadi dalam

bidang program KB (=keluarga berencana) sangat patut dikemukakan.

Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia merasa bangga karena kisah-sukses tentang program KB yang dijalankannya. Kisah sukses itu menjadi salah satu kebanggaan pemerintah, dan menjadi perhatian dunia internasional. Tetapi tatkala hasil sensus 1980 diumumkan semua orang terperanjat, karena ternyata kenaikan penduduk Indonesia masih jauh di atas 2%. Walaupun telah dicoba usaha untuk memahami kenyataan itu dengan berbagai dalih, namun salah satu sebabnya ialah karena statistik laporan-laporan yang disampaikan selama ini tidaklah mencerminkan keadaan yang sebenarnya, melainkan disesuaikan dengan kehendak Bapak yang menginginkan program KB sukses.

Kenyataan-kenyataan itu menunjukkan bahwa ada konsep-konsep tradisional yang masih tetap hidup dan berkembang dengan subur dalam alam yang memakai payung “modernisasi”. Konsep itu mungkin berasal dari alam pikiran tradisional budaya sukubangsa atau daerahnya sendiri. Yang menyulitkan ialah karena sampai sekarang konsep-konsep yang terdapat dalam berbagai budaya sukubangsa itu belum pernah diidentifikasi secara jelas. Ada beberapa telaah yang agak mendalam tentang sukubangsa tertentu, terutama tentang sukubangsa Jawa, yang dikerjakan oleh para sarjana asing, namun tak pernah diketahui apakah hasil telaah tersebut dijadikan referensi oleh para pengambil keputusan. Sementara itu pihak pemerintah sendiri seakan-akan dengan sengaja menghindarkan diri untuk memperbincangkan soal-soal budaya daerah secara terbuka. Pernyataan-pernyataan resmi sampai sekarang umumnya berupa pujian dan sanjungan terhadap keluhuran budaya daerah. Dan walaupun ungkapan yang berbunyi “diambil yang bermanfaat, dibuang yang mudarat” (dari kebudayaan daerah maupun dari kebudayaan asing) diterima secara umum, namun tak pernah ada usaha yang terarah untuk menentukan apakah gerakan yang bermanfaat dan apa pula yang mudarat itu.

Tumbuhnya kebiasaan melakukan upacara adat bangsawan daerah dalam pernikahan anak-anak para pejabat penting, seakan-akan adat-adat yang penuh kebesaran dan udara kehidupan dalam istana raja-raja dahulu itulah yang dianggap “bermanfaat”. Seakan-akan ada perlombaan untuk saling bermegah-megahan di antara mereka yang berasal dari sukubangsa yang sama, dan juga dengan yang berasal dari sukubangsa yang lain.

Keengganan membicarakan secara terbuka konsep-konsep budaya daerah dalam hubungan pembangunan nasional, nampak juga pada keengganan untuk membicarakan masalah bahasa daerah sampai sekarang. Walaupun kedudukan budaya dan bahasa daerah, cukup jelas dalam Undang-undang Dasar, namun penterjemahan lebih terperinci tentang hal itu tidak juga dilakukan. Orang mengatakan tentang pentingnya bahasa daerah, tetapi tindakan yang nyata untuk mengembangkannya tidak pernah dilakukan. Yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ini hanyalah menjadikannya sebagai obyek studi belaka. Sedangkan kedudukan bahasa daerah tertentu yang selama ini di daerah yang bersangkutan dipakai sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar sampai tingkat tertentu (III), dihapuskan sejak 1975. Bahasa Indonesia dinyatakan harus dipakai sebagai satu-satunya bahasa pengantar di seluruh Indonesia, sejak kelas I Sekolah Dasar. Tidaklah diperhatikan keluhan para guru yang pada prakteknya harus juga memakai bahasa pengantar bahasa daerah, karena murid kelas I belum memahami bahasa Indonesia. Menurut statistik 1980, hanya 12% bangsa Indonesia yang sehari-hari mempergunakan bahasa Indonesia; dan masih ada 39% yang samasekali belum dapat berbahasa Indonesia. Tetapi kenyataan itu (walaupun mungkin saja angka-angkanya mengikuti ABS), tidak pernah menggugah para pengambil kebijaksanaan di pemerintahan pusat untuk memanfaatkan bahasa daerah sebagai sarana yang potensial dalam modernisasi. Perlu saya kemukakan bahwa bahasa daerah di Indonesia ada yang sudah sejak berabad-abad dipakai oleh sukubangsa yang bersangkutan dan sudah pula mempunyai bahasa tertulis yang kaya, di antaranya ada yang berasal dari abad ke-11, bahkan abad ke-8 (menurut salah satu pendapat terakhir seorang sarjana).

Bahasa Jawa (dipakai oleh 40% penduduk) dan bahasa Sunda (dipakai oleh 22% penduduk), begitu pula bahasa-bahasa Bugis (2%), Madura (5%), Minangkabau (2%), Banjar (1%) dan lain-lain, tidak pernah dimanfaatkan secara berencana dan intensif untuk menyebarkan gagasan dan pengertian tentang modernisasi. Nampaknya masih ada semacam kekuatiran kalau-kalau pengembangan bahasa-bahasa daerah itu akan menimbulkan gangguan buat kehidupan (bahasa) nasional. Kekuatiran itu saya kira disebabkan antara lain oleh karena para petugas yang menggariskan kebijaksanaan tidak mengenal dengan baik kekayaan-kekayaan yang terdapat dalam budaya dan bahasa

daerah tersebut.

Modernisasi yang seharusnya dilaksanakan dengan memanfaatkan konsep-konsep, nilai-nilai dan sarana yang terdapat dalam kehidupan budaya tradisional daerah, oleh sementara ahli dipertentangkannya, sehingga timbul gambaran seakan-akan tradisi itu menghambat modernisasi. Tak mustahil memang ada konsep atau nilai tradisi yang selama ini dianut, yang tidak cocok dengan usaha modernisasi. Tetapi jelas bahwa lebih banyak lagi konsep, nilai dan sarana yang dapat dimanfaatkan, asal saja mengetahuinya dengan baik.

Masalahnya ialah bagaimana menyadarkan para perencana nasional bahwa penduduk pedesaan Indonesia yang menurut statistik berjumlah kl. 85% itu bukanlah angka-angka mati, melainkan manusia yang hidup dalam lingkungan budaya dan tradisi yang mempunyai nilai-nilai tersendiri. Pendekatan selama ini memperlihatkan seakan-akan mereka menganggap rakyat banyak (baik yang di pedesaan maupun yang tinggal di kota-kota) hanya semata-mata angka-angka mati yang harus mengikuti segala rencana yang mereka buat.

Dengan kata lain, lebih menyadarkan para ahli pembangunan itu akan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan tradisi.

Rujukan

- Arief Budiman, "Perekonomian Pancasila sebagai sistim alternatif", sk. *Kompas*, 29 September 1981;
- Imam Waluyo (ed), *Dialog Indonesia Kini dan Esok*, Leppenas 1980;
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, cetakan ke-9 1982;
- Onghokham, *Rakyat dan Negara*, Sinar Harapan, 1983;
- Schoorl, J.W., *Modernisasi, pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Gramedia, 1980;
- Shils, Edward, *Tradition*, The University of Chicago Press, 1981;

インドネシアにおける伝統と近代化

アイブ・ロシディ（大阪外国語大学）

I

ふつう人は「伝統」という語を「近代化」に対立させて考える。その場合、伝統とは近代化をさまたげるものであり、近代化は伝統社会の変革の上に実現されるものである。しかし私は「伝統」という語の外延をより広くとり、そうすることによってより正確な意義をその語に与えたいと思う。そのため、ここでは、エドワード・シルズがその著書『伝統』（シカゴ大学出版、1981年）において与えた定義を採用したい。シルズによれば、「その最も素朴で基本的な意味において、それ（伝統）は『引きつがれたもの』である。つまり、過去から現在へと伝えられ、受け継がれるものすべてであり、有形の事物をはじめ、あらゆる物事についての信仰、人物像、出来事、慣習、制度などを含む。さらに、建築物やモニュメント、風景、彫刻、絵画、本、道具、機械もそれに含まれる。それは、その時の社会が所有するものすべて、そして当該社会が所有者としてそれを所有するにいたる以前にすでに存在していたものすべてを含む。ただし、単に外界の物理的過程で生じたにすぎないものや生態的ないしは生理的必要によって生じたものは含まない。(p.12)

伝統と呼ばれるまでにどのくらいの時を経ねばならないかについて、シルズ自身、満足すべき説明は見当たらないと述べている (p.15)。しかし、その時間があまりにも短かければ、継承したものは当然伝統とはなりえな

い。シルズによれば、伝統と呼ばれるためには少なくとも三世代を経ねばならない (p.15)。しかし彼自身、一世代とは何年間なのかをはっきりとは言っていない。

一方、近代化については、J・W・スホールルがその著書『近代化の社会学——非西洋民族社会学入門』（ファン・ロホホム・スラテルス社、1974年）の中で用いた定義を採用したい。スホールルによると、「社会の近代化とはすなわち変容過程であり、あらゆる側面にあらわれた社会変化である。(p.1)」私はこの定義を、クンチョロニングラット（文化人類学者）がその有名な著書『文化、メンタリティ、開発』（グラメディア社、1974年）の中で与えた定義とむすびつけたいと思う。彼はこう言っている。「ある民族が意識的に近代化を始めようとする時、実際は、その民族が生きている時代の世界の枠組にみずからを適応させようとしているのである。そういう意味では、この20世紀においてだけではなく、過去のあらゆる時代が近代化の過程を経験してきたことになるのである。(9刷、1982年。p.138)」

この三人の学者たちが与えた定義を考え合わせてみればわかるとうり、「伝統」という語を「近代化」の反対の意味にとる必要はなく、それどころかこの二つの語はお互いにかたく絡み合っているのである。世代を越えて受け継がれた伝統をもつある社会が、そのすでに所有しているものとは異なった遺産を受け入れようとして、その生活の諸側面にトータルな変化をきたす時、その社会は近代化の過程を経験しているのである。そしてその過程が終わり、その変容が完成の域に達すると、社会はあらたな変容過程が必要となる新しい状況に出会うまでその伝統を継承してゆくことになる。

クンチョロニングラットは上に掲げた本の中で次のような例を紹介している。紀元前二世紀から二世紀までの間、ローマ帝国が世界の枠組を決定していた時代、地中海沿岸及び中部、北部ヨーロッパの諸国は、そのロー

マ帝国の経済、政治、文化によって決定される世界の状況に適應する努力を意識的に行なった。また、四世紀から十世紀にかけて、インドや中国の諸王朝が世界の枠組を決定していた時代、東南アジアや東アジアの国々は、そのインド及び中国諸王朝の経済、政治、文化に意識的に適應する努力を行なった。(上掲書、p.138)

かくしてインドネシア諸島の社会はその歴史を通じて常に近代化の過程にあったことになる。なぜなら、次々と変わる世界的強国が波のごとくその影響を及ぼして来るごとに変容過程を経験していたからである。インドネシア社会はインド諸王国が衰退したのち、イスラム諸王国の経済、政治、文化に適應しようとし、そののちヨーロッパからおしよせた波に洗われた。イスラムの影響が平和的に入って来たのに対し、ヨーロッパ人は当時成長しつつあった資本主義的欲望にかられてインドネシア諸島に到来し、それまでは独立していた王国を、時には直接的に、また時にはお互いを競争させるやり方で、ひとつひとつ支配下におさめていった。そして、国際政治においてヨーロッパ諸国の力が優勢となるに及んで、インドネシアにおいてそのヨーロッパの経済、政治、文化への適應という変容過程が始まったのである。

インドネシア諸島はアジア大陸とオーストラリア大陸の間に位置し、イギリス、オランダ、スペイン、ポルトガルといったヨーロッパの国々によって分割されていたことはまず言うておく必要があるかと思う。実際先にやって来たのはポルトガルとスペインだが、結果的にはオランダがその大半を支配することになった。ヨーロッパ列強による植民地分割は、第二次世界大戦後この地域にあらわれた独立国家の形成の枠組を決定した。「蘭印」という呼称で知られていたオランダの植民地はインドネシア共和国になった。ティモール島の東端を支配していたポルトガルも、現地住民がインドネシア共和国への帰属を宣言したことにより、ついにはそこを放棄せざるをえなかった。イギリス植民地は現在マレーシア、シンガポール、ブ

ルネイに、またスペイン植民地は一担アメリカ合衆国に移されたのちフィリピン共和国になった。イリアン島の東半分はパプア・ニューギニアになった。

この地域には数多くの民族が住んでいて、それぞれ異なった歴史、慣習、言語、芸術、宗教、信仰などをもっている。ヨーロッパ人たちはそれぞれの地に支配権をうちたてようとした時、彼らの支配しようとした地域社会の文化に何の注意も払わなかった。そうして、例えば、マラッカ海峡をはさんで生活していたマレー民族は二つに分断されてしまい、スマトラ東岸とリアオ諸島に住んでいた人々はオランダの統治下に入り、マレー半島とシンガポール島の住民は英国の統治下に入った。このことは今日に至るまでの彼らの運命を決定づけた。つまり、あるものはインドネシア共和国国民となり、そしてまたあるものはマレーシア国民、シンガポール国民となったのである。しかし、国籍によって分けられてはいても、彼らが何世紀もの間共有財産として来た慣習、服装、芸術、文学などの多くは今もまだ生き続けている。さらに、異なる民族の支配を受けたという歴史的背景のちがいがそれぞれに独特の色合いを影響として残してはいるけれども、今日インドシアで共通語（インドネシア語）となったマレー語は、マレーシア、シンガポールでも国語となっている。だから、それぞれ自国の言葉を用いてもお互いによく理解できるのである。

その中でもインドネシアは国土が最も広く、大小一万数千個の島々からなり、部族や言語の数も一番多い。それもただ数が大きいというばかりでなく、その間に横たわる違いもまた大きい。ある部族、特にジャワ島に住んでいる部族は、発達した高度な文明をもち、最新の技術進歩にもなじみ、その恩恵を享受することができる。しかしその一方で、イリアン・ジャヤのある部族のように石器時代の生活をしているところもある。インドネシアに生活するその他の部族はこの二つの文明の段階の途中にあるわけで、インドネシア民族全体として見れば、人類の文明発展の歴史をそのままう

つしているといえる。ひとつの島から別の島へ旅をすれば、そこでわれわれが越えるものは単に島と島との間の物理的距離ばかりではなく、時代と時代の間の時間的なへだたりでもあるのである。いまだ石器時代に暮らし、狩猟生活をおくっている部族もいれば、森を拓いて畑をつくり、土地がやせるとまた移動して別の森を切り拓くというやり方の農業を知っている部族もいる。そしてすでに近代に生きる部族がある。まだ閉鎖的な暮らしをしている部族が多くいる。今まで政府は同じ民族である外部の同胞たちと同じレベルで生活するよう彼らを説得してきた。その結果そのような部族の数は減ってきている。要するに、インドネシアに居住するさまざまな部族の間に見られる差は非常に大きいのである。

たとえ簡潔にはあれ、私がこういった事実をここで言うておく必要があると思ったのは、前世紀の中頃、明治天皇のもとで近代化を推し進めようとした時の日本の事情と、いくつかの異なる外国民族による、その期間や徹底度も地方ごとにまちまちの支配を受けたのち、この20世紀の中頃、になって初めて独立を手にしたインドネシアとの間に本質的な違いがあることを示したかったからである。(インドネシアは三百五十年間の支配を受けたと簡単に言ってしまう人が多いが、調べればそうではないことがわかるだろう。

明治天皇が近代化の推進を決定した時、日本人はすでに約三百年もの間まとまったひとつの民族であり、同一の文化と言語をもっていた。それらすべての上に、すでに数千年の長きにわたって日本の統一と支配者の象徴たる天皇があり、それによって日本は確たる政治的統一体となっていた。つまり、その時日本の政治的、文化的統一はすでに長い伝統であったのである。

しかしインドネシアではまったく事情が異なる。インドネシア民族が独立を宣言した時、持っていたものといえば、1929年に承認されたものの国民の大半がまだ十分に理解、修得してはいなかった国語、国旗たる紅白旗、

「偉大なるインドネシア」という国歌、それに主権を有した民族国家をうちたてようという固い決意だけであった。憲法制定や政府の組織はあと回しにされたが、それでも彼らがまずもって直面した問題は近代化などというものではなく、インドネシアを再び支配しようとするオランダとの抗争であった。結局インドネシア民族が主権を獲得するためにそれから五年の歳月を要した。そして主権が認められたのちもしばらくは、内的な問題を片付けなければならなかった。というのも、さまざまな政治紛争が起きて、民族統一のひとつの要たる政府が弱体化してしまったからである。当時の政党の間には見解の相違が見られた。それは単に政治的見解の相違というよりも、むしろ政党指導者たちの教育、文化的背景が異なっていたために生じた、より根本的な点での考え方のちがいによるものであった。そしてそれが原因となって、政党は、組織としてより整然とした近代的な軍隊からの信用を失くし、社会的勢力としての力を弱めてしまった。地方でいろいろな紛争が起きたあと（といっても、本当は軍部の将校たちの間で起きた紛争だったのだが）、インドネシアにおける軍部の地位はますます突出したものとなった。1959年制憲議会が国家の基本理念や形態について結論を出すことができずに停滞していた時、スカルノは軍部の支持を得て、国民によるはじめての選挙で選ばれたその制憲議会を解散させてしまった。それ以後彼は政治の権限をひとつひとつ自分の手中に移しかえていった。はじめは民主主義を信奉していたスカルノのような独立運動の闘士がなぜみずから民主主義をなしくずしにしてしまうような行動をとったのか、それ自身興味深い研究になるだろう。しかし、おそらくそのことはスカルノ個人の教育、文化的背景と関係があるに違いない。ジャワ人でイスラム教徒、オランダ式教育を受け（彼は終始オランダ人学校に学んだ）、読書を通じて社会主義の考え方の影響を受け、のちに民族運動に身を投じ、政党内の仲間の中でも傑出した指導者となった。ハッタやシャフリルらと違って、スカルノは外国へ行ったことも、外国でなんらかの組織の指導者となっ

たこともない。ある歴史学者によると、そうした事実こそ、スカルノが1930年代に彼の政党（インドネシア国民党）を通じて民族運動を指揮していた時に彼と対等にやれる友人を見いだすことのできなかつた理由であるという。つまり、彼はジャワ人として常にジャワの伝統的世界に生きていたのであり、そこでは指導者というものはあらゆる問題について決定を下す、いわば真実の^{みなもと}源であって、指導者の元に届けられる意見は無視してもかまわない単なる考える上での参考でしかなかった。そしてそのようなスカルノの態度は、指導者というものは民衆より賢明で、決して民衆を犠牲にするはずがないと信じ、すべてを指導者に一任してしまうという、ジャワ人の、ひいてはインドネシア人の思考の中にまだ脈々と生き続けているその伝統とぴったり一致する。ジャワ人の考え方では、民衆とは王に仕えるものであり、したがって生きるも死ぬもまったく王次第なのである。しかしながら、民衆がその願いを王に訴えることのできる制度もまたあった。それは白いシャツを着、王宮前の広場にすわって王の呼び出しを待つというものである。ふつうそういうことは行政上異常な事態が発生した時に行なわれた。

しかし1960年代初頭のインドネシアはもはやすべてがジャワというわけではなく、といってもともとインドネシアはジャワ（だけ）ではなかったから、白いシャツを着て願いを訴え出ることのできた制度もなくなってしまった。つまり、その時代、インドネシアの民主主義は後退を示したのである。まだ安定していないと考えられていた権力を保持しようとするあまり、スカルノの指揮する合唱に声を合わせない者は反政府、反革命とみなされた。そしてそうみなされた者は皆、しかるべき手続きも経ず何年間も牢獄にほうり込まれ、時には残酷な拷問を受けたりした。

その時、スカルノ時代に使われた言い方とは違うけれども、政府と意見を異にする者は政府の敵であるという考えがインドネシア人の中に生まれた。それは、政府役人たちの中に、自分たちは常に正しいのだという感覚

を生みだし、一方大衆は我が身の安全のためには口に気を付けなければならないことを悟った。そのような意識が国民の欲求の抑圧を招いたということは申すまでもないが、ましてや、マスコミや議会など国民代表機関への厳しい統制からもわかるとおり、欲求を述べるための制度も限られていた時代にあつてはなおさらであった。

II

新秩序政府は、1960年の終りに近代化を始めた時、まず、異なった教育レベルや思考風土、文化をもついろいろの部族から成る社会に取り組みねばならなかった。一方、民主主義を支える意識はエリートの内部でもすでにスカルノの「指導民主主義」体制下で消え失せてしまっていた。スカルノ失脚後まもなく湧きあがった一部知識人の自由拡大を要求する声も、開発（＝近代化）の道をはばむものとされ、すぐにかき消されてしまった。軍部と知識人との協同体制によってエリート集団を形成する政府は、農業と経済部門での開発プログラムに力点を置いた。投資部門ではインドネシア人の力が弱かったので、外国資本を魅力的な条件を付けて招いた。そして外国資本に対して保証を与えるため、政府は当の外国系企業で働く自民族の労働者の権利にさまざまな抑圧を行なった。また外国資本に対してはさまざまな優遇措置を行なったので、例えば、繊維、清涼飲料水などの部門で今まで操業してきた国内の企業が閉業に追い込まれる結果となった。

新秩序政府と旧秩序政府（スカルノ）の政策を比べてみると、非常に極端な差が見られる。スカルノ時代には、外国資本は招かれたどころかすでに存在してたものすら追放された。といってその時代、労働者の権利に真陰な関心が寄せられたわけではない。その時代、労解者の争議権は剝奪されていた。ただ大儀名分が違っていたにすぎない。かつては「革命のために」であり、それが、今は「開発のために」なのである。

スカルノが強調したかったことは、外国資本の援助を受けるのではなく、

自分たちで開発を行なうということだったのだろう。彼は社会主義を信奉し、資本主義と帝国主義は世界中の民族の苦悩の根本的原因であるとしてそれに対してあからさまな抵抗を示した。そしてそのことが、形の上では非同盟諸国団結のイニシャティヴをとる人間のひとりでありながら、彼に社会主義陣営への接近をなさしめた要因であった。彼自身、インドネシア社会主義、すなわち、彼が発展させたいと思っていた、インドネシアに生まれインドネシアの状況に合った社会主義の理念を信奉していた。しかしながら、結局それは単なるレトリックにすぎなかった。

スカルノはまだ革命は終わっていないという考えを繰り返し強調したが、それによってみずからは、外国の敵に対するに国民の力を盾とすることに憂き身をやつす結果となった。イリアン・ジャヤを奪還したあと、マレーシアに対し、新植民地主義に加担するものだと対決政策をとった。このマレーシア対決政策はスカルノ最大の失策であり、それが自分自身の政府の崩壊を早めたのだと私は思う。

おそらく、このスカルノの民族経済建設における失敗を見て、新秩序における開発の立案者たちはまったく逆の方向に走ったのではないか。スカルノがとりわけ資本主義国からの投資や援助を徹底して拒否・排斥したとすれば、新秩序政府は笑顔でそれを招き入れた。しかし新秩序の経済再建サクセス・ストーリーの成功物語（インフレ抑制、G N P増大など）が批判をかわなかったわけではない。学生たちによる汚職批判はかわすことができて、開発の方向が正しいのかどうかを問う批判は、とりわけ理論派の学者による論文・論説の形をとって今でも絶えることがない。しかしその批判があまりにも直接的だとみなされる場合、政府はただちに手を下す。かつてドゥリアル・ヌール教授が教授就任学術講演をしようとした時、突然中止の命令が出された。おかしいことに、のちにオーストラリアに滞在中、その学術講演の各部分をインドネシアの新聞に掲載した時、それに対する反応は何もおこらなかったのである。

社会主義ないしはインドネシア社会主義に関する議論は今日ではほとんど聞かれなくなった。しかし、インドネシアの経済体制が資本主義体制であることも政府は言ったことがない。新秩序の形成に尽力し、のちにその最も手厳しい批判者となった、アリフ・ブディマンという社会学者は、今日のインドネシアの経済体制は依存資本主義であり、今日のインドネシアに見られる外国資本への依存、外国資本に依存する支配階級、経済活動における国家の役割そして抑圧の道具としての国家の役割、貧富の差などの現象はその体制の特徴であるとしている。

アリフ・ブディマン自身は、インドネシアに最適なのはインドネシアの状況に合わせた社会主義経済体制であるという意見をもっている。彼は、スカルノ時代の経済体制には社会主義の特徴が見られない、したがってその時代におこなわれたことというのはまだ社会主義経済体制と呼べるものではなく、むしろ民族資本主義経済体制なのであると言っている。

アリフ・ブディマンによると、昔（スカルノ時代）が今と違う点は、単に、スカルノが内に対してより大衆主義的、外に対してより民族主義的であったことである。しかし資本主義経済体制のヴァリエーションである点では両者とも同じである。

しかしながら、現実にインドネシアにおける近代化の実施を決定づけてきたのは、そのような学者たちの批判や論争の成果などではなく、官僚たちが上からの命令をどのように理解し実行したかということであった。監視機関が設置されてもすぐに既存の官僚組織の中に取り込まれてしまうし、国民による直接的な監視は強化されどころかその場所すら与えられていない。したがってその官僚たちの理解の仕方が非常な決定力をもつのである。

ところで政府が行なう諸々の政策の実施者たる役人たちの教育、文化的背景がお互い異なっており、その結果、しばしば（遠く離れた地方の）下級のレベルの役人が実際にやったことが初期の目的とはまったく違ったも

のになっていたということがある。このことは常に覚えておいていただきたいと思う。説明のためここにひとつだけ実例を紹介したい。それは1983年7月11日、例の皆既日食の日に関わったことである。皆既日食の際太陽の方角を裸眼で見ると失明をきたすおそれがあると発表されたため、皆既日食の時は注意するようにとの警告がだされた。ところが、日本のテレビでも見たとおり、村落のみならず都市の住民までもが日食を直接に見てはならないことになってしまっていた。人々は家にいてテレビ放送を通じてのみ見ることを許された。その命令を実行するため、村吏や自警団は人々を家の中に入れて回るのに大忙しだった。そして、インドネシア政府自身が観光の目玉として宣伝しておきながら、政府役人が指示を誤解して実行したために、インドネシア人自身はかくもまれなる自然現象をみすみす見逃す結果となったのである。

この皆既日食騒動が、比較的教育水準の高い人々の住むジャワでだいたいい起きたことを考えると、それより辺地の役人たちが上からの指示を間違えて解釈した可能性は十分に想像できる。この皆既日食騒動については、その後新聞などでも読者からの相当批判的な投書と共になかなり取りあげられたが、何の反応もなかった——つまり、その指示に対する誤解がいったいどの辺から始まったのかということについての政府自身による説明はなされなかったのである。

政府は官僚機構のおかした誤ちを決して認めようとはしない。誤った行為がもはや隠しおおせなくなると、「ある個人」が不注意をおかしたとだけ発表する。あたかもその「個人」だけが悪いと言っているかのようである。しかし同じような誤ちをおかす「個人」は他にも大勢おり、その数やおびただしいものだが、その全員が関心を集めるわけではないし、また注目されたとしても、その全員が罰を受けるわけでもない。

ここには、王とその臣下たちは決して誤ちをおかさないものだという考え方の影響があると思う。そのような考え方によると、政府内に個人が得

る役職は国民への義務などではなく、その地位につく者に特権を与え利益をもたらすものなのである。(これと関連して注目してよいのは、インドネシア語では、英語で government「政府」というところを perintah「命令」からの派生語である pemerintah「命ずる者＝政府」という語を用いていることである。)役人の成功はその職務にしたがってどれほど国民に奉仕したかによってではなく、ひとえに彼の上司にどれだけ仕えたか、つまりどれだけ気に入ってもらえたかによって決まるのである。

インドネシアには、頭文字をとって ABS と略される「上司の気嫌さえよければ(よい)」という意味の慣用句があり、部下をおさえつけ、うそをでっち上げてまでも上司の機嫌取りをしようとする報告書を皮肉ったものである。その例として、「家族計画」部門で起きたことを紹介するのは実に当を得たことであろう。

長い間、インドネシア政府はみずから行なってきた「家族計画」政策の成功を誇りに思っていた。その成功談は政府の自慢となり、国際的な関心を集めた。しかし1980年のセンサスの結果が公表された時、人々は皆驚いた。インドネシアの人口増加率は以前として2%のはるか上をいていたからである。いろいろな口実によってその事実を理解しようとする努力が試みられたが、その原因のひとつは、これまでに提出された報告書の統計数字が現実を反映しておらず、「家族計画」の成功を願う上司の願望に合わせて作られていたということであった。

これらの事実、「近代化」という傘をさした今日の状況の下でも、今なお生き続けますます成長している伝統的観念があることを物語っている。そういった観念は、部族文化やその地方に特有の伝統的思考風土に由来するものであろう。問題なのは、いろいろな部族文化に見られるさまざまな観念が、今日に至るまではっきりと把握されていないことである。ある特定の部族、とりわけジャワ族については外国人研究者によるかなり詳しい研究があるけれども、政策決定者たちがそれらの研究成果を参考にし

ているのかどうかは知るよしもない。その一方で、政府自身はあたかも地方文化の諸問題をオープンに論じることを意図的に避けているかのようである。政府のこれまでの公式見解は、一般的に、地方文化の偉大さに対してお世辞を並べたてるものでしかなかった。(地方文化や外国文化から)「有益なものを取り、有害なものを捨てる」というスローガンは広く受け入れられているけれども、いったい何が有益で何が有害なのかを決める方向で何かがなされたことはない。

昨今、高級官僚の間で、子弟の結婚式を地方貴族の慣習儀礼にのっとって行なうことが流行となってきたが、これなどそういった威厳と宮廷的ムードに満ちた過去の王宮の慣習こそが「有益」であると考えているかのようである。まるで出身部族を同じくするもの同士、また異なる部族出身の者との間で、見栄を競っているようである。

地方文化の諸観念を国家建設とのからみでオープンに論じようとするしない態度は、今日まで地方語問題を論じようとするしないところにも見られる。地方文化と地方語の位置は憲法において十分明らかなだが、それ以上の詳しい解釈はなされたことがない。地方語の重要性を指摘することはあっても、それを発展させる現実の方策が講じられたことはない。この数年来してきたことは、単にそれを研究の対象とすることであった。一方、地方では小学校のある学年(三年)まで地方語を用いて授業を行なってきたが、それも1975年以後はとりやめとなった。小学一年から授業ではインドネシア語しか用いてはならないことになったのである。それでも一年生はまだインドネシア語がわからないので、やむを得ず地方語を用いて授業を行なわなければならない現場の教師たちの不満に政府は耳を貸そうとしない。1980年の統計によると、インドネシア語を日常用いている人は国民のたかだか12%にすぎず、インドネシア語をまったく使えない人も39%いる。しかしこのような現実を見ても(この数字だって「上司の機嫌さえよければ」式かも知れないが)、中央政府の政策決定者たちは、地方語を近代化に役立つ手

段として利用する気にはならないのである。インドネシアの地方語の中には、すでに数世紀に渡ってその部族によって用いられてきた言語や、十世紀、あるいは（最近のある学者によると）八世紀にまでさかのぼれる豊かな書きことばをもつ言語もあるということを言うておく必要があるだろう。

ジャワ語（国民の40％が使用）、スンダ語（国民の22％が使用）、ブギス語（2％）、バンジャル語（1％）などの地方語が、近代化の概念や意味を広めるために計画的、集中的に利用されたことはない。どうやら、地方語の発展が国（語）レベルの生活に支障をきたすことになりはしないかとの危惧があるらしい。そのような危惧は、政策を立案する担当官たちが地方文化と地方語の豊かさをよく知らないのがひとつは原因だろうと思う。

近代化は地方伝統文化の中にある観念や価値、その他有効な手段たりうるものを利用してなされねばならないのに、専門家がその二つを対立的に用いるがゆえに、あたかも伝統が近代化を防げているかのようなイメージを与えてしまったのである。今まで従ってきた伝統的な観念や価値の中に、近代化の実践に合わないものがないとは言えない。しかし、よく承知してさえいれば、利用できる観念や価値、その他の有効な手段たりうるものの方がより多いことは明らかである。

問題は、統計によると85％にものぼるインドネシアの村落住民が、単なる死せる数字ではなく、独自の価値をもつ文化と伝統の環境の中に生きる人間であることを、どうやって国の政策立案者たちに悟らせるかである。これまでの彼らの見方は、彼らが大衆というものを（村落住民であれ都市住民であれ）彼らの作る計画にはすべて従わねばならぬ、あたかも死せる数字の如くに考えていることを示している。

別の言い方をすれば、要は、伝統的生活の中にある価値を開発の専門家たちに悟らせることである。

参考文献

原文参照のこと。

（訳，大阪外国語大学助手 松野明久）